|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.suarantb.com/Images/round.gifhttp://www.suarantb.com/Images/transf.gif | **RedaksiIklanArsip**http://www.suarantb.com/Images/transf.gif**Halaman UtamaHari Ini** |

|  |
| --- |
| http://www.suarantb.com/Images/transf.gif |

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.suarantb.com/Images/transf.gif | **Gubernur Tak Diskriminatif** |

|  |
| --- |
| http://www.suarantb.com/Images/transf.gif |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |

|  |
| --- |
| *updated: Sabtu 29/12/2012* |
| http://www.suarantb.com/2012/12/29/newsImages/tokoh.png**Dian Kartika Sari (Suara NTB/aan)**PILKADA NTB 2013 akan menjadi pertaruhan penting bagi nasib Provinsi NTB lima tahun mendatang. Karenanya, dalam memilih pemimpin NTB nanti, kaum perempuan diharapkan memilih gubernur yang yang tidak diskriminatif, berpihak terhadap kaum perempuan dan mampu melindungi anak - anak.Demikian benang merah pendapat Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dian Kartika Sari, yang dikonfirmasi *Suara NTB* di sela Kongres ke III KPI Wilayah NTB, di Mataram, Jumat (28/12). Dia menegaskan, saat ini KPI sudah punya garis yang cukup tegas dalam memerankan diri pada suksesi kepemimpinan di daerah.‘’Kita tidak akan memilih partai mana, tapi kita lihat visi dan misi mereka. Kita harapkan, gubernur terpilih nanti akan berpihak pada perempuan dan punya perhatian terhadap perlindungan anak,’’ sebut Dian saat ditanyai soal bagaimana organisasi perempuan seperti KPI sebaiknya mengambil peran dalam suksesi nanti.Menurut Dian, daerah – daerah dengan persoalan IPM seperti NTB membutuhkan pemimpin yang bisa memprioritaskan perhatiannya pada kepentingan kaum perempuan, ibu dan anak. Sebab, pada merekalah terletak kunci persoalan peningkatan IPM di sebuah daerah.Dian menambahkan, pihaknya juga berkeinginan untuk mendorong agar demokrasi juga ditumbuhkan dari lingkungan organisasi – organisasi perempuan, seperti halnya yang diterapkan di KPI. Ia mencontohkan proses terpilihnya Ir. Sri Sustini sebagai Sekwil KPI NTB untuk periode 2012-2016 yang berlangsung cukup demokratis. Perangkat organisasi KPI, yang terdiri dari Sekretaris selaku pemegang kewenangan eksekutif dan Presidium yang memegang kewenangan lembaga legislatif juga menggambarkan miniatur demokrasi di organisasi.‘’Jadi kita membiasakan bahwa demokrasi itu dilatih di rumah sendiri. Dan perempuan yang sudah mendapatkan pendidikan kader dasar, itu tahu hak – haknya,’’ ujar Dian.Bahkan, menurutnya, jika ada benih – benih praktik demokrasi yang tidak sehat, seperti politik uang atau penggunaan kampanye hitam, para kader sudah bisa mendeteksinya dan akan langsung memasang sikap antipati terhadap kader perempuan semacam itu.‘’Justru itu akan menjadi bumerang bagi mereka. Bahkan untuk yang *black campaign*(kampanye hitam). Jadi kita membiasakan diri untuk menerapkan demokrasi dengan nilai – nilai persaudaraan, anti kekerasan,’’ tandasnya. (aan) |

 |

|  |
| --- |
| **©Copyright Suara NTB** |